



EITI
INDONESIA

BANDUNG, 15 AGUSTUS 2023

RAPAT FORUM MSG

SEKRETARIAT EITI INDONESIA



<https://eiti.esdm.go.id>

Agenda Pembahasan

- Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia

- Pelaksanaan Mainstreaming EITI Indonesia

- Perkembangan Portal Data Industri Ekstraktif

- Persiapan Validasi EITI Indonesia

- Pembahasan Teknis Lainnya

A photograph of an offshore oil rig at sunset. The rig's complex metal structure, including a tall derrick and various platforms, is silhouetted against a bright orange and yellow sky. The sun is a glowing orb on the right side of the frame. In the foreground, a dark, corrugated metal surface, likely a ship's deck, is visible. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia

Sejarah Pelaksanaan EITI



2010

Pembentukan Tim Transparansi Pendapatan dan Pendapatan yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif melalui Perpres No. 26 /2010

2011
2018

- Pelaksanaan EITI Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pelaksanaan validasi laporan EITI kelima
- Laporan EITI ketujuh mendapatkan status *meaningfull progress*

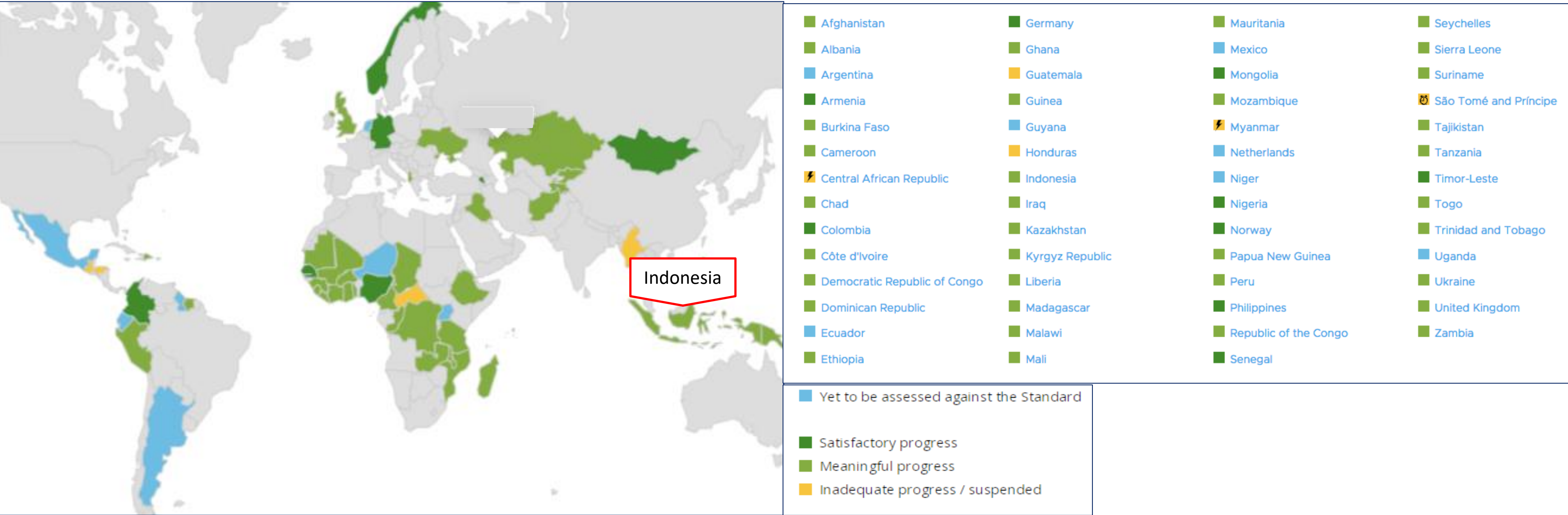
2019
2021

- Pelaksanaan EITI Indonesia sempat diambil alih oleh Kementerian Marves, namun turunnya Perpres 82 tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan transparansi industri ekstraktif dikembalikan ke Kementerian ESDM dan Kemenkeu sesuai tugas dan fungsinya
- Kementerian ESDM menginisiasi pembentukan Forum MSG

2022
2023

- Penyampaian laporan EITI kesepuluh
- Persetujuan EITI Board terhadap usulan *partial mainstreaming*
- Pembangunan portal data industri ekstraktif

EITI dilaksanakan di 57 Negara



Posisi Indonesia

Indonesia menjadi salah satu pelopor negara yang berhasil menerapkan implementasi pengarusutamaan sebagian pada EITI Standard 2019, hal ini ditetapkan dalam Implementing Committee Paper Dewan EITI Internasional pada 16 Agustus 2022

Kegiatan Pendukung: Diskusi-diskusi Tematik



- Implementasi EITI dan Transisi Energi yang Berkeadilan (Maret 2023)
- Dialog EITI Indonesia: Mempertanyakan Kesetaraan Gender dalam Industri Ekstraktif. Sudah seberapa jauh? (November 2022)
- Transparansi Industri Ekstraktif dalam persepektif ESG (September 2022)
- Dana Abadi Regional untuk Daerah Kaya Sumber daya Ekstraktif (Juli 2022)
- Keterbukaan informasi Beneficial Ownership (BO) (Desember 2021)
- EITI dan Energi Transisi (November 2021)

Anggota Forum MSG EITI Indonesia-Non K/L



	Pemerintah Daerah		Lembaga Swadaya Masyarakat
1	Dinas ESDM Provinsi Aceh	1	Indonesian Center Environment for Law ICEL (2022-2025)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	2	Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat FKPM Riau (2022-2025)
3	Sekretaris Daerah Provinsi Riau	3	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Somasi NTB (2022-2025)
4	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara		
5	Sekretaris Jenderal ADPMET		

No	Asosiasi	No	Perusahaan
1	Indonesia Petroleum Association (IPA)	1	PT. Pertamina (Persero)
2	Indonesia Mining Association (IMA)	2	Mining Industri Indonesia (MIND ID)
3	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)		

A photograph of an offshore oil rig at sunset. The rig's complex metal structure, including a tall derrick and various platforms, is silhouetted against a bright orange and yellow sky. The sun is a glowing orb on the right side of the frame. In the foreground, a dark, corrugated metal surface, likely a ship's deck, is visible. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Pelaksanaan Mainstreaming EITI Indonesia

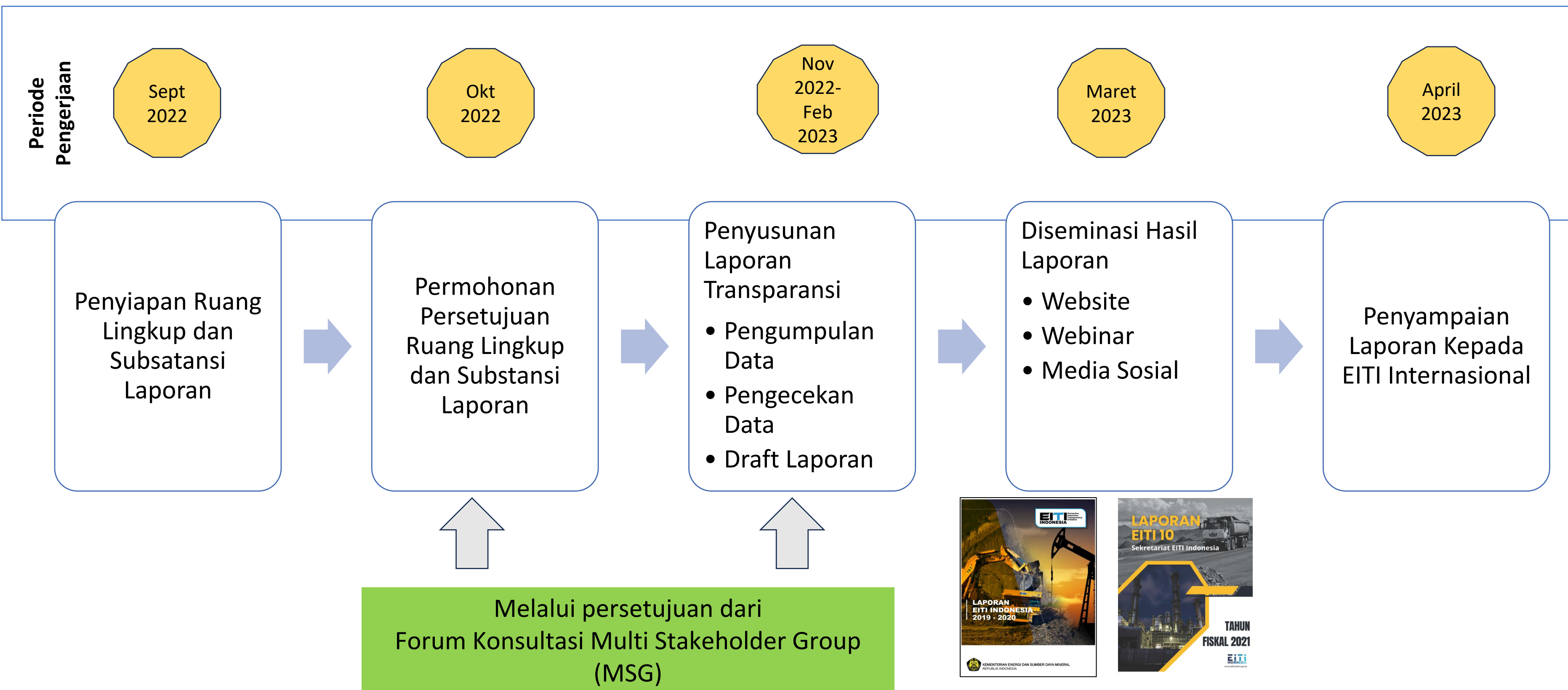
Mekanisme Pelaporan yang Dilakukan Saat Ini

Contoh dalam Penyusunan Laporan 10 (FY 2020-2021)



EITI
INDONESIA

Lag waktu pelaporan bisa mencapai Y+2 dan periode penyusunan mencapai 7 bulan



Ruang Lingkup Laporan yang Disampaikan



EITI
INDONESIA

Tujuan pelaporan

- Membuka data dan informasi industri ekstraktif untuk setiap rantai nilai (perizinan, produksi, penerimaan, dst)
- Menjelaskan ringkasan data migas & minerba yang masuk dalam *partial mainstreaming*
- Memastikan kriteria keterbukaan data mengacu pada Persyaratan Standar EITI 2019 dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ruang Lingkup

Bab I

Latar Belakang, Tujuan Laporan Konstektual, serta perkembangan dan rencana kegiatan EITI Indonesia

Bab II

Data dan informasi yang masuk dalam persyaratan *partially mainstreamed* terkait : kerangka hukum dan daftar izin (Req. 2.1; 2.3), kegiatan industri ekstraktif (Req. 3.1 - 3.3), pendapatan transportasi (Req. 4.4), distribusi pendapatan, dan DBH (Req. 5.1; 5.2), pengeluaran kuasi fiskal dan kontribusi ekonomi (Req. 6.2; 6.3)

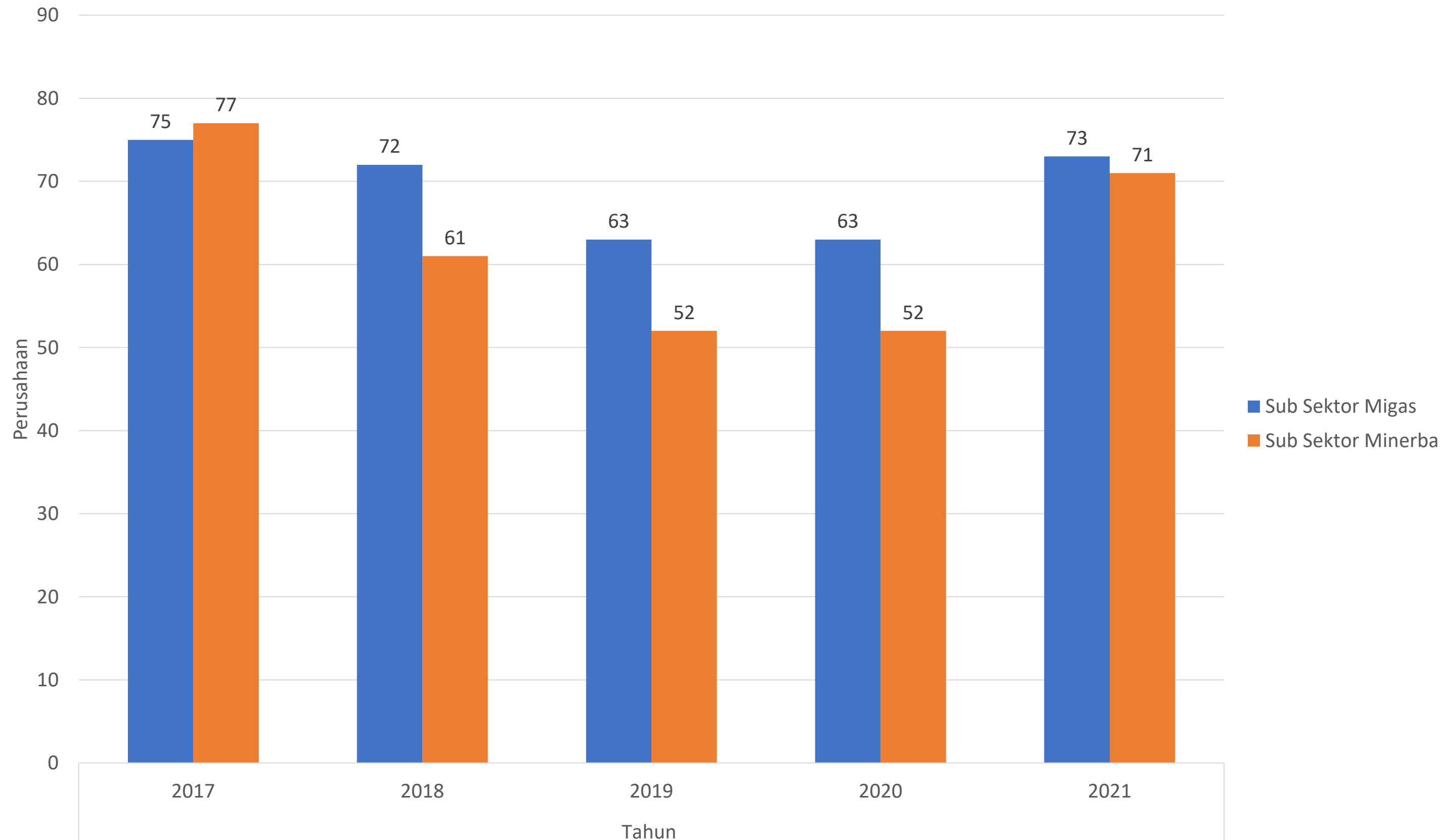
Bab III

Data dan informasi yang belum masuk dalam persyaratan *partially mainstreamed* terkait alokasi kontrak, izin, dan BO (Req. 2.2; 2.4 – 2.6), penerimaan pajak, PNBP, transaksi keuangan BUMN, pembayaran kepada pemerintah daerah (Req. 4.1 - 4.6); dan pengeluaran sosial dan lingkungan (Req. 6.1; 6.4)

Partisipasi Perusahaan dalam Pelaporan EITI



EITI
INDONESIA



Detail Informasi:

1. Total KKKS Migas yang mengisi Kuisiener EITI tahun 2021 telah mencapai lebih dari 98% dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia
2. Total perusahaan Minerba yang mengisi Kuisiener EITI tahun 2021 mencapai 34% dari perusahaan yang berkontribusi sebesar 95% dari PNBK Minerba

Rencana Mainstreaming yang Akan Dilakukan



EITI
INDONESIA

Data Mainstreaming

- 

Legal Framework
- 

License Allocation (Migas)
- 

License Register (Migas dan Minerba)
- 

Beneficial Ownership (Minerba)
- 

Exploration | Production (Migas dan Minerba)
- 

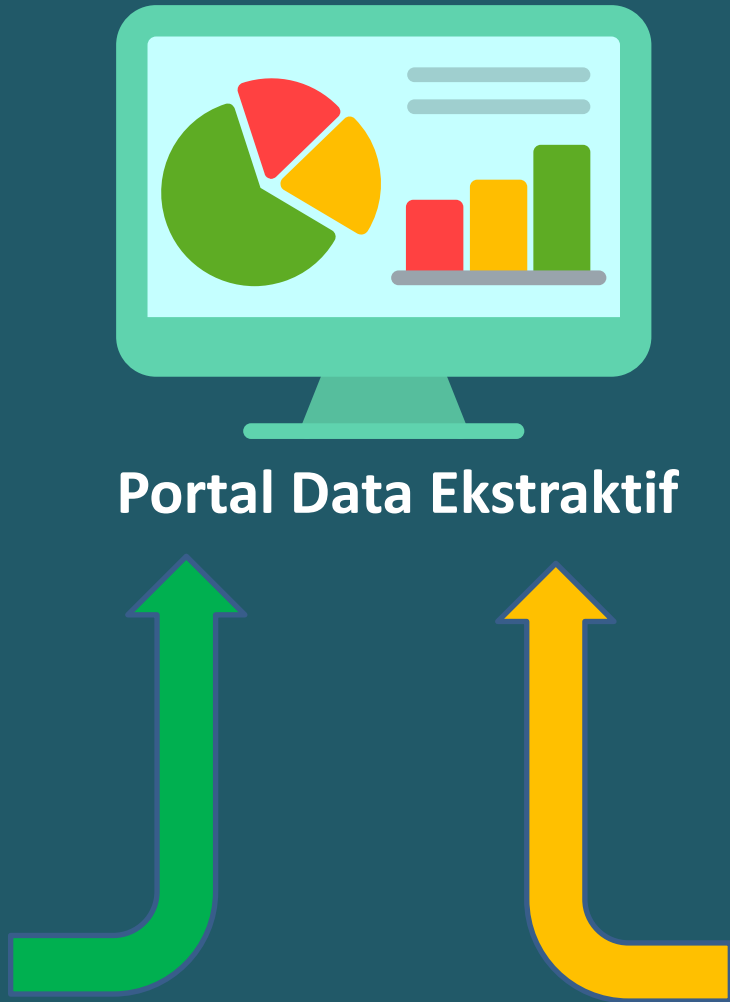
Tax and Revenue (PNBP Minerba)
- 

Sales State of Share
- 

Transportation Revenues
- 

Subnational Transfer (DBH)
- 

Export Contribution to Economy



Data Manual

- 

Tax and Revenue (Pajak Migas dan Minerba | PNBP Migas)
- 

Transaction Related to SOEs
- 

Subnational Payment
- 

Distribution of Revenue
- 

Social & Environmental Expenditure (CSR)
- 

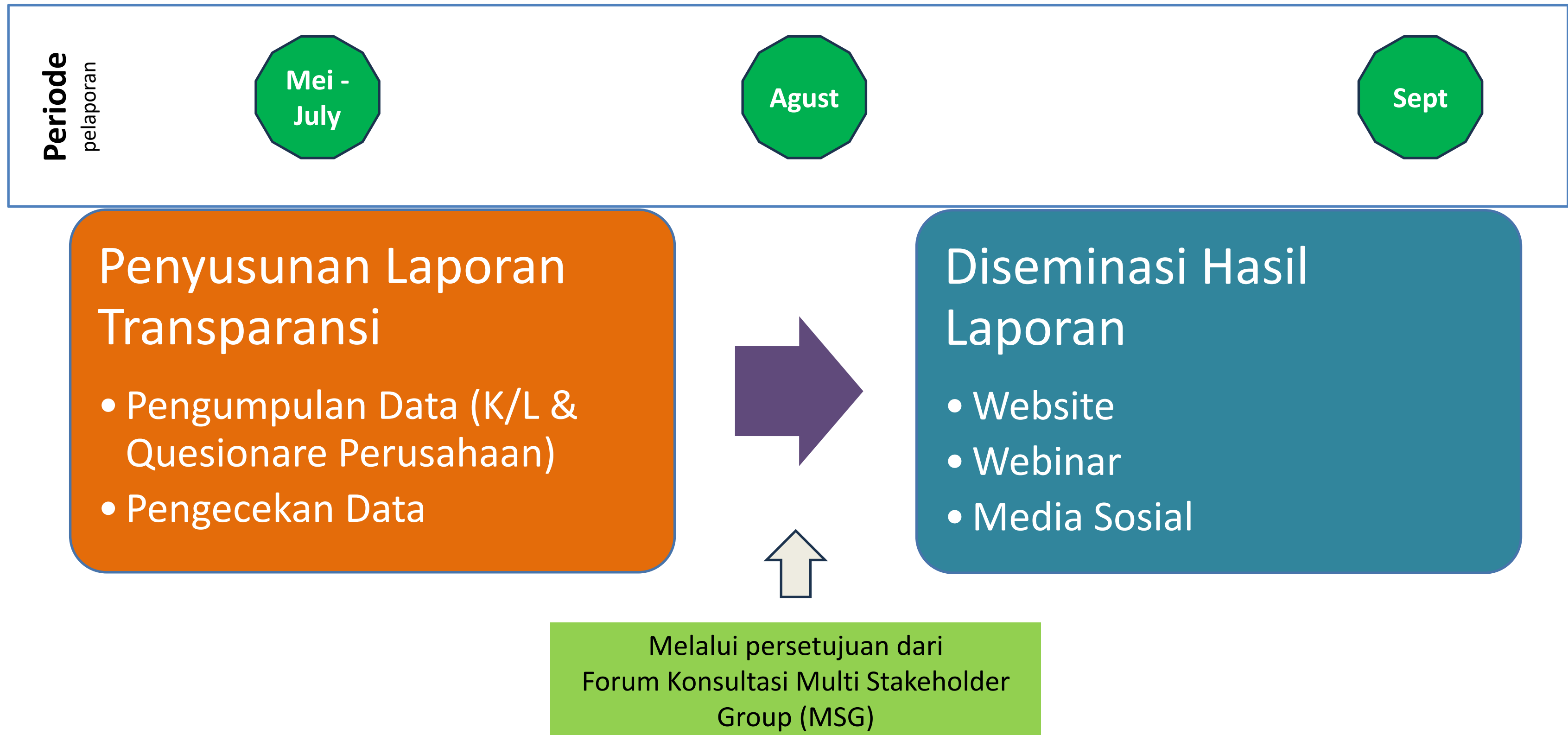
Quasi Fiscal Expenditures

Alur Pelaporan Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) dalam Pasca tersedia nya Portal



EITI
INDONESIA

Lag waktu pelaporan bisa menjadi Y+1 dan periode penyusunan mencapai 5 bulan



The background image shows a large industrial facility, possibly an oil or gas processing plant, silhouetted against a bright orange sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a strong backlight effect. The facility includes several tall distillation columns, a large crane on the left, and various pipes and structural elements. The foreground is a dark, textured surface, likely water.

Perkembangan Portal Data Industri Ekstraktif

Pengembangan Portal Data Ekstraktif



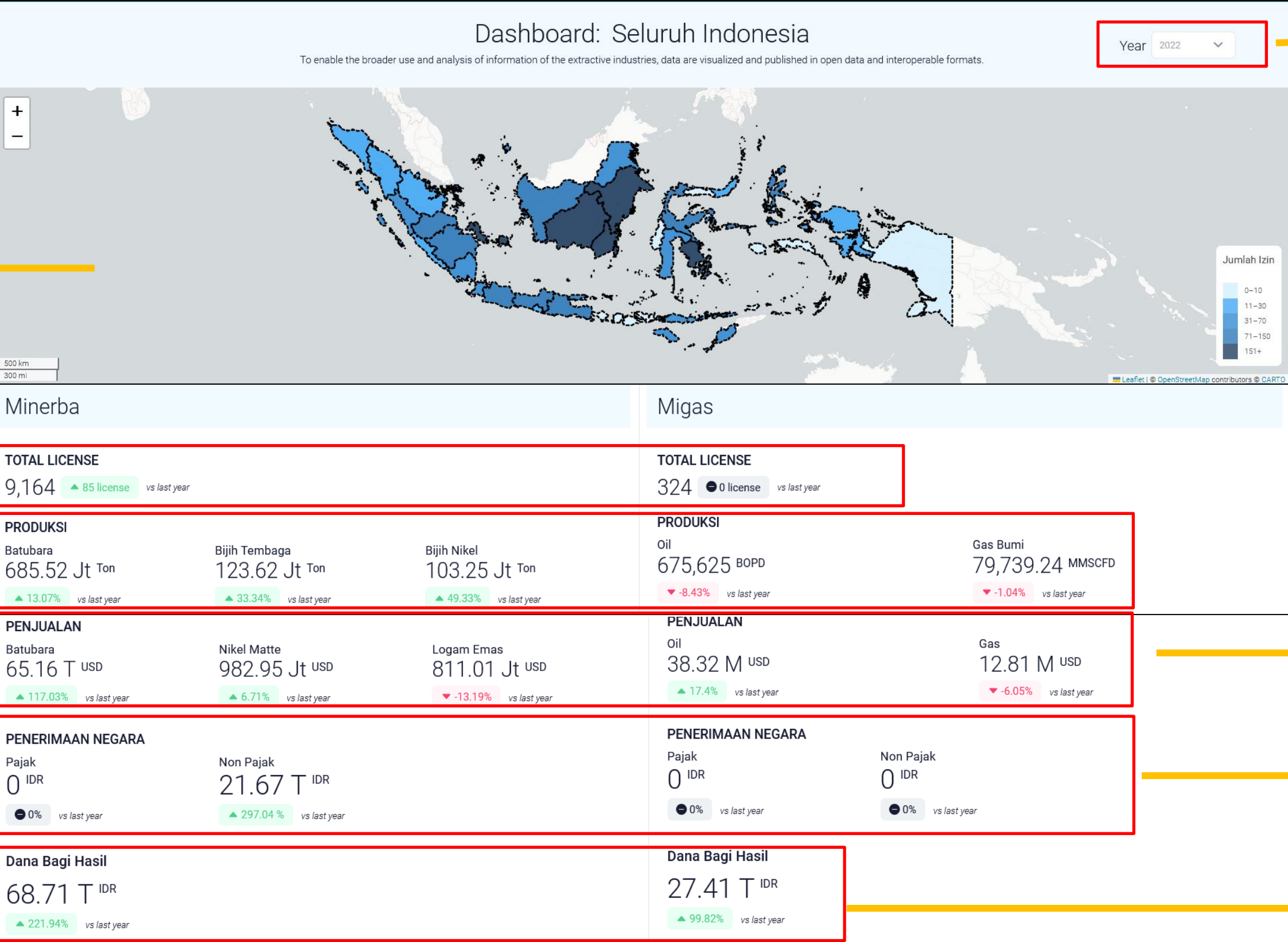
EITI
INDONESIA

Dashboard
Summary Nasional
(Landing Page)

Visualisasi nasional dan per Provinsi yang dapat dipilih untuk melihat informasi data

Informasi data untuk mengetahui jumlah izin yang terdaftar

Menampilkan data Produksi per komoditas nasional dan menyajikan data produksi 3 komoditas terbesar di setiap provinsi



Memilih informasi data berdasarkan tahun yang dipilih

1

Menampilkan data nilai penjualan per komoditas nasional dan menyajikan data nilai penjualan 3 komoditas terbesar di setiap provinsi

5

Menampilkan data DBH setiap provinsi dan kabupaten/kota

6

Menampilkan data DBH setiap provinsi dan kabupaten/kota

7

Menampilkan informasi data berdasarkan alur industri

[View Dashboard Detail](#)

[Daftar Badan Usaha](#)

8

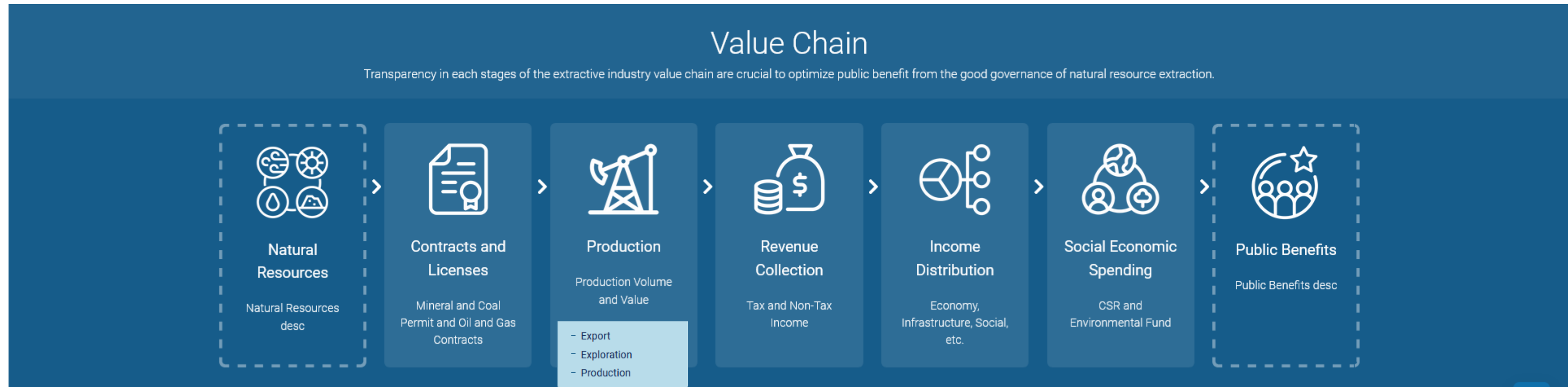
Pengembangan Portal Data Ekstraktif



EITI
INDONESIA

1

Highlight Alur Industri Ekstraktif



Menyajikan alur industri ekstraktif, dengan adanya hover data per requirement Standard EITI, sehingga memudahkan user dalam bernavigasi dalam mencari informasi data Industri Ekstraktif

Pengembangan Portal Data Ekstraktif



1

Dashboard Alur Industri Ekstraktif



Provinsi : [Summary Perizinan](#) [Izin & Kontrak](#) [Eksplorasi](#) [Produksi \(Volume\)](#) [Penjualan](#) [Penerimaan Negara](#) [Dana Bagi Hasil](#) [Social Environment](#)

Data Perizinan

Nama Badan Usaha ^	Komoditas	Produk	Jenis Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
CV BOMBANA MAJU MAKMUR	Mineral	Batu Gamping	IUP	314/DPMPTSP/V/2019	17 May 2019	17 May 2024
CV ILYAS KARYA	Mineral	Batu Gamping	IUP	1063/I/IUP/PMDN/2022	25 July 2022	31 May 2027
CV KISWAH PERDANA	Mineral	Pasir Kuarsa	IUP	1591/1IUP/PMDN/2021	23 November 2021	21 October 2031
CV MARGO JOYO GROUP	Mineral	Peridotit	IUP	1062/1/IUP/PMDN/2022	20 July 2022	20 July 2025

Navigation berfungsi untuk memudahkan user dalam mencari data Industri Ekstraktif

Data Produksi

Produk			Unit		
(All)			Ton		
Tahun ^	Komoditas	Produk	Cadangan	Sumber Daya	Unit
2017	Mineral	Bijih Nikel	16.59 M	29.67 M	Ton
2018	Mineral	Bijih Nikel	35.25 M	29.97 M	Ton
2018	Mineral	Bijih Nikel	14.40 M	0	Ton, WMT
2019	Mineral	Bijih Nikel	322.52 M	973.30 M	Ton
2020	Coal	Batubara	13.31 M	99.07 M	Ton

Data DBH

Tahun	Komoditas	Produk	Tipe	Target	Realisasi	Unit
(All)	(All)	(All)				
Tipe			Unit			
(All)			IDR			
Tahun ^	Komoditas	Produk	Tipe	Target	Realisasi	Unit
2018	Minerba	Minerba	DBH SDA Minerba - Royalti	140,700.00 M	340,110.00 M	IDR
2018	Minerba	Minerba	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	15,670.00 M	14,090.00 M	IDR
2018	Total DBH		Dana Bagi Hasil	427,360.00 M	587,550.00 M	IDR

Summary Perizinan

Source: Last Update:

0

IPR

221

IUP

1

IUPK

0

K3S

2

KK

0

PKP2B

0

SIPB

224

Total

Provinsi SULAWESI TENGGARA

Pilih Kota/Kabupaten

Table Of Content

[Summary Perizinan](#)

[Data IUP](#)

[Data Eksplorasi](#)

[Data Produksi \(Volume\)](#)

[Data Produksi \(Invoice\)](#)

[Dana Bagi Hasil](#)

50 km

30 m

Nama Badan Usaha

Komoditas

Jenis Perizinan

(All)

(All)

(All)

Kebutuhan Data Yang Belum Tersedia Di Dalam Portal



Data Pajak Minyak dan Gas Bumi

Kelompok Data	Jenis Data	Level	Cut-off Data	Akses Data
PPH Minyak dan Gas Bumi	Realisasi	Per-KKKS	Year+6 Bulan	✗
PPH Badan Minyak dan Gas Bumi	Realisasi	Per-KKKS	Year+6 Bulan	✗
PBB Minyak dan Gas Bumi	Realisasi	Per-KKKS	Year+6 Bulan	✗
PPN Remboursement Minyak dan Gas Bumi	Realisasi	Per-KKKS	Year+6 Bulan	✗

Data Pajak Mineral dan Batubara

Kelompok Data	Jenis Data	Level	Cut-off Data	Akses Data
PPH Badan Minerba	Realisasi	Per-Perusahaan	Year+6 Bulan	✗
PBB Pertambangan	Realisasi	Per-Perusahaan	Year+6 Bulan	✗

Data PNBP Minyak dan Gas Bumi

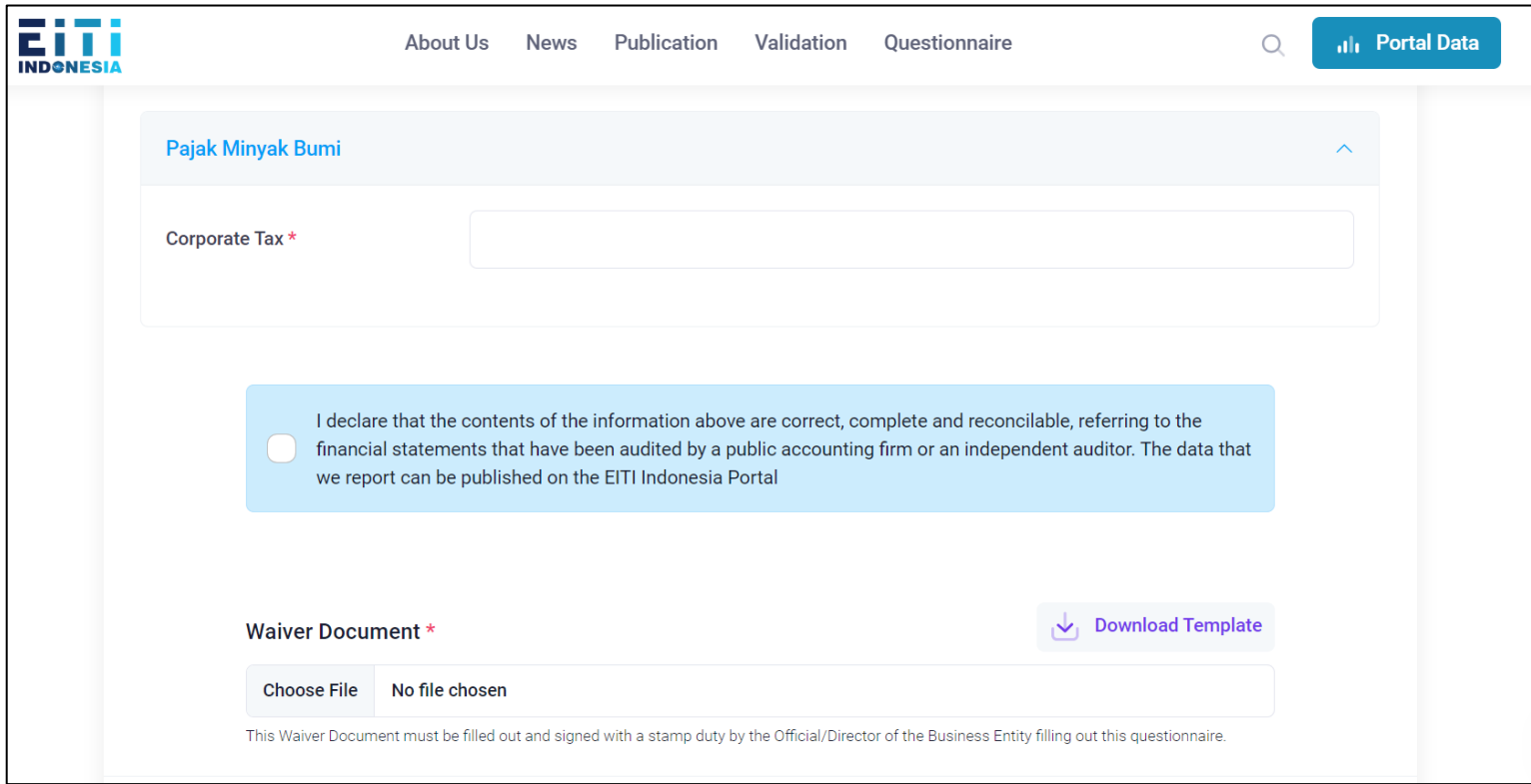
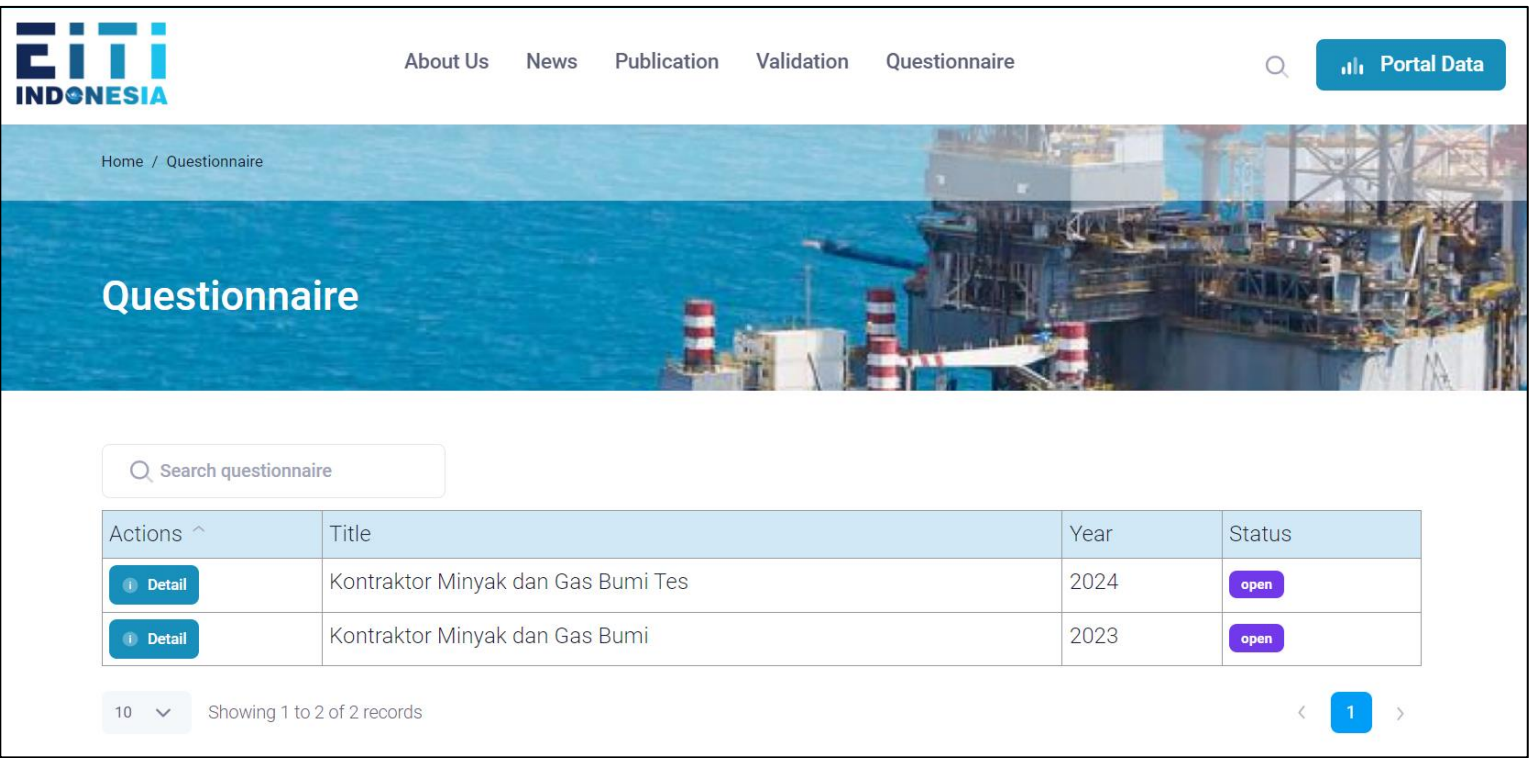
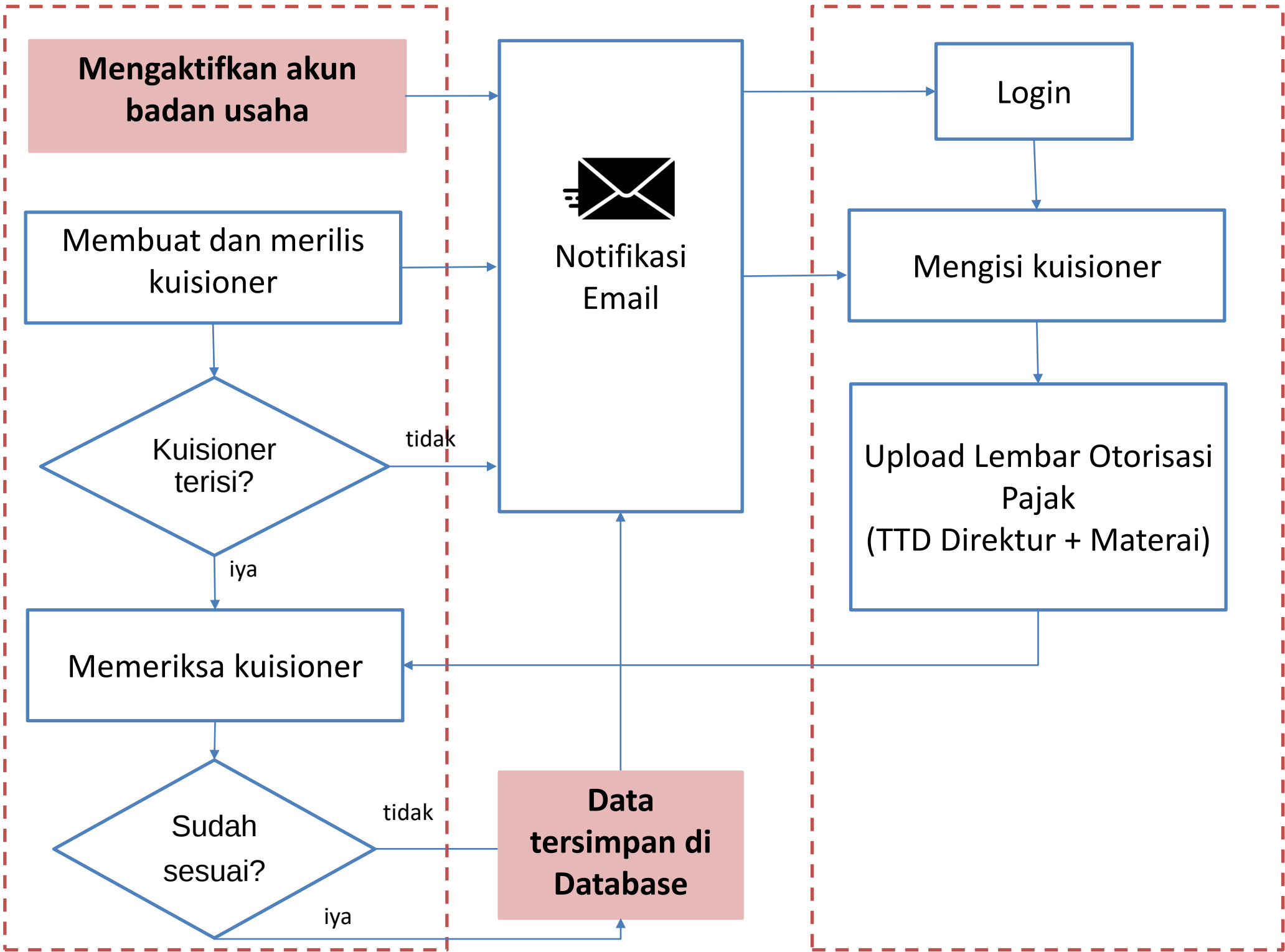
Kelompok Data	Jenis Data	Level	Cut-off Data	Akses Data
PNBP Minyak dan Gasbumi	Rencana dan Realisasi	Per-Perusahaan	Year+6 Bulan	✗

Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan Melalui Format Webform Kuesioner Pada Portal EITI



Sekretariat Forum MSG

Badan Usaha



Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan melalui format webform kuesioner pada Portal EITI

B. Kesepakatan verifikasi data migas dan peran dari SKK Migas seperti apa ?

Kondisi alur data saat ini dengan menggunakan laporan



Portal Data

1. Bagaimana mekanisme ketika data langsung disampaikan ke Portal Data Ekstraktif melalui Web-Form ??? Apakah SKK Migas perlu untuk dibuatkan user pada portal atau menyediakan fitur upload data ?

Sekretariat EITI
mengirimkan
kuisiomer
permintaan data
KKKS



SKK Migas
mengirimkan
kuisiomer
permintaan data
ke KKKS



KKKS
mengirimkan
hasil pengisian
kuisiomer data
untuk di
verifikasi oleh
SKK Migas



Data Migas yang
telah di verifikasi
oleh SKK Migas
akan menjadi
data Laporan
EITI

???

KKKS mengirimkan kembali ke SKK Migas

SKK Migas akan mengirimkan data dari KKKS yang telah di verifikasi

Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan melalui format webform kuesioner pada Portal EITI



Record data per NTPN per Perusahaan

II. INFORMASI DIREKONSILIASI									
Corporate Tax									
Bulan Pembayaran (Cash Basis)	Oil			Gas			Pinalti		
	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD)	Tanggal Pembayaran	NTPN	Nilai (USD/IDR)
Jan-18	16 Jan 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	243.534						
Feb-18	15 Feb 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	196.567	15 Feb 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	283.728			
Mar-18	15 Mar 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	477.970	15 Mar 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	278.824			
Apr-18	16 Apr 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	546.317	16 Apr 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	291.863			
Mei-18	27 Apr 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	71.017	27 Apr 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	169.997			
Jun-18	15 May 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	77.266	15 May 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	293.441			
Jul-18	08 Jun 2020	ABCDEFGHIJKLMNO	864.467	08 Jun 2020	ABCDEFGHIJKLMNO	347.127			
Agu-18	16 Jul 2020	ABCDEFGHIJKLMNO	564.500	16 Jul 2020	ABCDEFGHIJKLMNO	187.300			
Sep-18	15-Agu-18	ABCDEFGHIJKLMNO	118.722	15-Agu-18	ABCDEFGHIJKLMNO	87.179			
Okt-18	14 Sep 2018	ABCDEFGHIJKLMNO	109.000						
Nov-18									
Des-18									
TOTAL			3.269.360			1.939.459			

Mengusulkan data pajak per NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dilaporkan per bulan

Jenis PPH yang akan digunakan terkait pendapatan industri Ekstraktif

Pajak penghasilan Pasal 29 menjelaskan tentang pajak kurang bayar.

PPH 25: Merupakan angsuran PPh yang terutang dan berfungsi sebagai pengurang dari PPh terutang yang kemudian hasilnya yaitu PPh Pasal 29 yang harus dibayarkan.



Meminta kesediaan DJP untuk menyampaikan data PPh Badan pasal 25 dan 29

Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan melalui format webform kuesioner pada Portal EITI



Contoh Lembar Otorisasi Data Pajak Perusahaan

Perbaikan Redaksional Lembar Otorisasi)

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK	
Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa Tim Fungsi Transparansi Industri Ekstraktif Dilaksanakan oleh KESDM dan Kementerian Keuangan, kami :	
Nama PT	
Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut: (NPWP)	
: 1) 01.001.002.3-004.005	
: 2) 01.001.002.3-004.006	
: 3) 01.001.002.3-004.007	
: 4) 01.001.002.3-004.008	
: 5) 01.001.002.3-004.009	
(Nomor Objek Pajak)	
: 1) 01.02.003.004.005-0007.7	
: 2) 01.02.003.004.005-0007.8	
: 3) 01.02.003.004.005-0007.9	
: 4) 01.02.003.004.005-0007.9	
Dengan ini, kami memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU no.7 Tahun 2021, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Forum Multi Stakeholder Group berdasarkan Kepmen ESDM No 164.K/HK.02/MEM.S/2021, mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah kami bayar dan laporkan pada tahun 2021.	
Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.	
Kami yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,	
Materai Rp.10.000,- , tanda tangan & cap perusahaan	
Nama : [Nama Pajabat]	
Jabatan : [Jabatan Setingkat Direktur]	
Nama : [Nama Pajabat]	
Jabatan : [Jabatan Setingkat Direktur]	
Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).	

Usulan perubahan redaksional



Usulan Perubahan Redaksional sebagai usulan dari Ditjen Pajak:
“Dengan ini, kami memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU no.7 Tahun 2021, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Forum Multi Stakeholder Group berdasarkan Kepmen ESDM No 164.K/HK.02/MEM.S/2021, mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan **pasal 25 dan 29** serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah kami bayar dan laporkan pada tahun 2021

Usulan perubahan redaksional



Usulan Perubahan Redaksional sebagai usulan dari Ditjen Pajak:
“Untuk ditandatangani oleh salah seorang **pejabat minimal setingkat Direktur** yang mewakili perusahaan dan namanya **tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi).**”

A photograph of an offshore oil rig at sunset. The rig's complex metal structure, including a tall derrick and various platforms, is silhouetted against a bright orange and yellow sky. The sun is a glowing orb on the right side of the frame. In the foreground, a dark, corrugated metal surface, likely the deck of a support vessel, is visible. A semi-transparent blue rectangular box is centered over the image, containing the text "Persiapan Validasi Indonesia" in white.

Persiapan Validasi Indonesia

Upaya Pencapaian Mainstreaming di Indonesia



Requirements	2018	2021	2022		2023
	Validation Result	Systematic Disclosure Feasibility Study Result	Partial Mainstreaming Application	EGPS Grant Mid Term Review	Systematic Disclosure Current State Assessment
NON REVENUE DATA					
2.1 Legal Framework & Fiscal Regime	Satisfactory	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
2.2 Contract & License Allocation	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	To be mainstreamed	To be mainstreamed
2.3 License Register	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
2.4 Contract Disclosure	Meaningful Progress	Significant legal and administrative limitations	To be disclosed in the annual EITI report	-	-
2.5 Beneficial Ownership	(Not Assessed)	Significant legal and administrative limitations	To be disclosed in the annual EITI report	-	-
2.6 State's Participation	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	-	-
3.1 Exploration	Satisfactory	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
3.2 Production	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
3.3 Export	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
5.1 Distribution of Extractive Industry Revenue	Satisfactory	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
6.3 Contribution of the Extractive Industry to the Economy	Satisfactory	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
6.4 Environmental Impact of Extractive Activities	(Not Assessed)	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	-	-
REVENUE DATA					
4.1 Comprehensive Disclosure of Taxes and Revenues	Inadequate	Significant legal and administrative limitations	To be disclosed in the annual EITI report	To be mainstreamed	To be mainstreamed
4.2 Sale of the State's Share of Production	Meaningful Progress	Significant legal and administrative limitations	To be disclosed in the annual EITI report	To be mainstreamed	To be mainstreamed
4.3 Infrastructure Provision and Barter Arrangement	(Not Assessed)	Partially mainstreamed, minor limitations	-	-	-
4.4 Transportation Revenues	Satisfactory	Fully mainstreamed	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
4.5 Transaction Related to SoEs	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	To be mainstreamed	To be mainstreamed
4.6 Subnational Payments	(Not Assessed)	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	-	-
5.2 Subnational Transfers	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	To be mainstreamed	To be mainstreamed
5.3 Revenue Management and Expenditures	(Not Assessed)	Partially mainstreamed, minor limitations	-	To be mainstreamed	To be mainstreamed
6.1 Social and Environmental Expenditures by Extractive Co	Meaningful Progress	Partially mainstreamed, major limitations	To be disclosed in the annual EITI report	To be mainstreamed	To be mainstreamed
6.2 Quasi-fiscal Expenditures	Inadequate	Partially mainstreamed, minor limitations	To be disclosed systematically	-	To be mainstreamed
CROSS CUTTING DATA QUALITY REQUIREMENT					
4.7 Level of Disaggregation	Inadequate		to be improved	to be fulfilled	-
4.8 Data Timeliness	Satisfactory		to be improved	to be fulfilled	-
4.9 Data Quality and Assurance	Inadequate		to be improved	to be fulfilled	-
7.2 Data Accessibility and Open Data	(Not Assessed)		-	to be fulfilled	-

Timeline Proses Pre Validasi EITI Indonesia (Pengisian template Stakeholder Engagement dan Outcome & Impact)



EITI
INDONESIA

Periode	Aktivitas	Keterangan
Agustus 2023	Pengisian Template : Stakeholder Engagement, Outcome & Impact, Transparency	Batas akhir pengumpulan template 30 Agustus 2023
September 2023	EITI Mission : Pre Validation Workshop dan Bilateral Meeting	4-12 September 2023
September – Desember 2023	Persiapan kelengkapan dokumen validasi dan penyempurnaan narasi template untuk mengidentifikasi gap requirement	Batas akhir pengumpulan seluruh dokumen validasi 31 Desember 2023
Januari 2024	Proses Validasi EITI Indonesia	Tim Validator mulai bertugas di awal bulan Januari 2024

A large offshore oil rig is silhouetted against a bright orange sunset sky. The sun is positioned directly behind the rig's central structure, creating a strong backlight effect. The rig features several cranes and complex piping. The foreground shows the dark, choppy surface of the ocean.

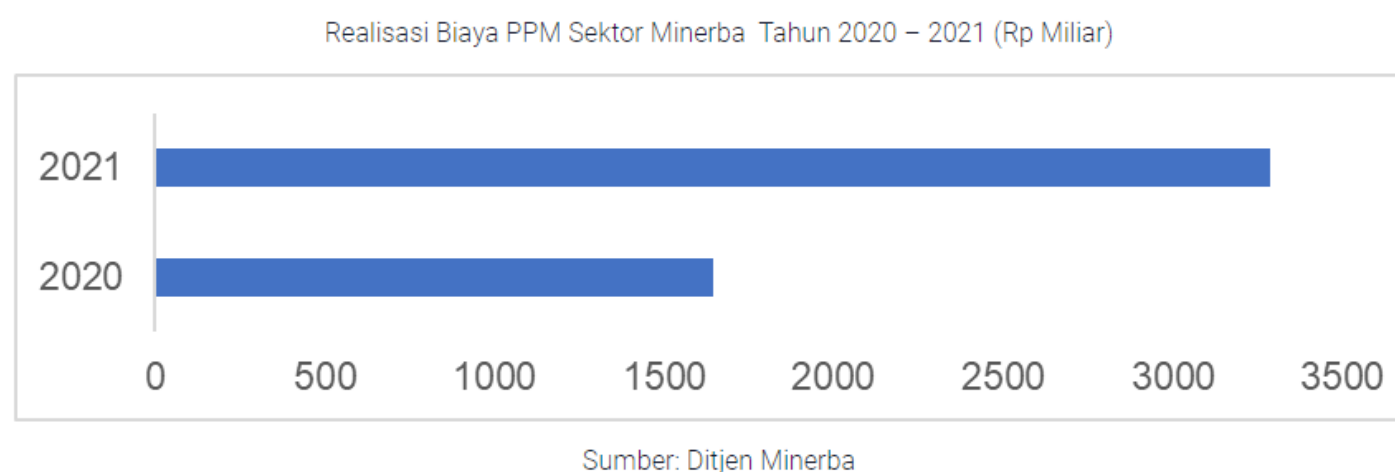
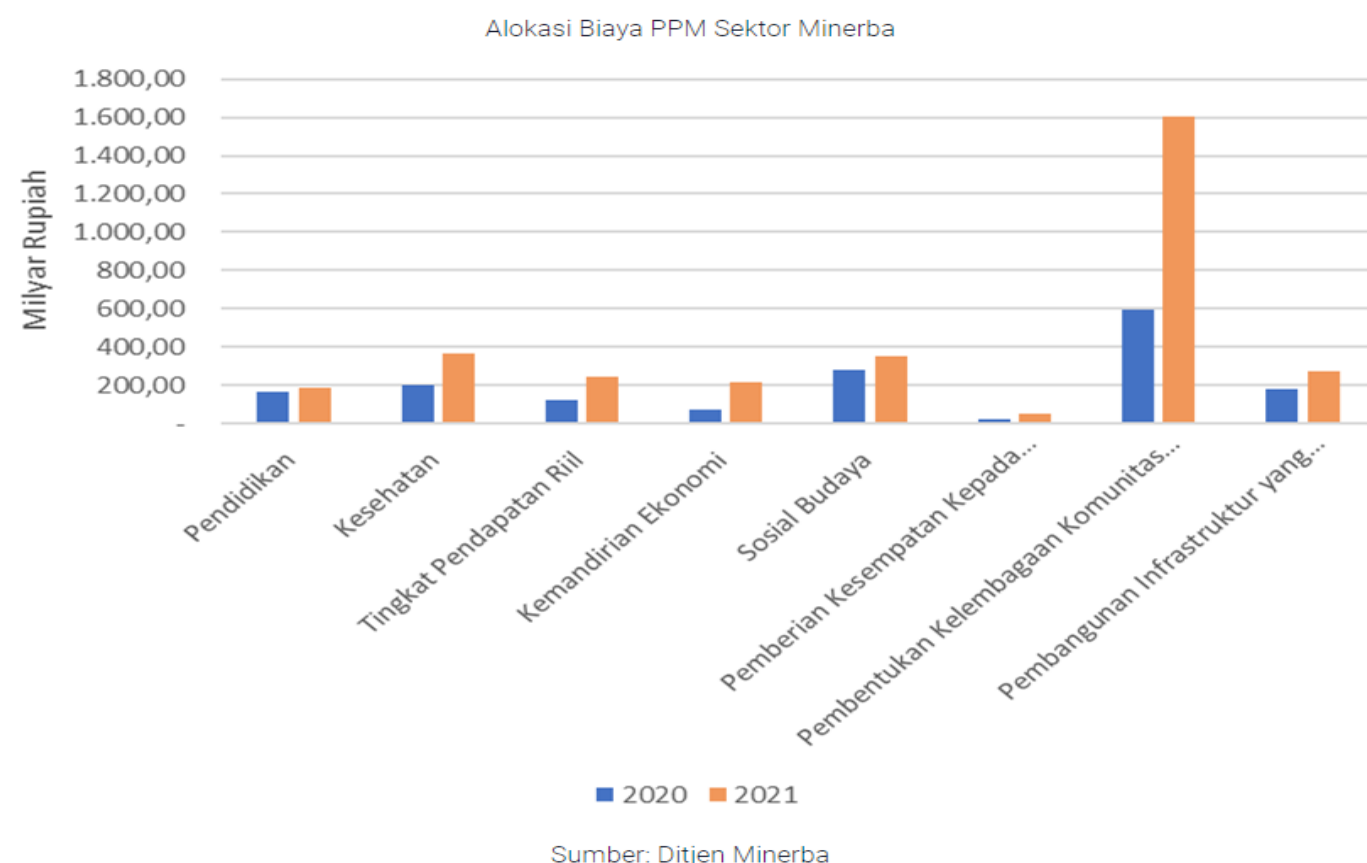
Pembahasan Teknis Lainnya

Kesepakatan terkait Data Social Expenditure



EITI
INDONESIA

Data CSR dari Pemerintah



Dari hasil data CSR yang diperoleh dari pemerintah hanya tersedia data alokasi yang memenuhi standard EITI namun untuk data realisasi masih bersifat agregat

Data CSR dari Perusahaan

Social and Environment Spending by Company

Company Name	2021	IDR
ARTHA TUNGGAL MANDIRI		1,260.32M
CV VENUS INTI PERKASA		926.26M
KITADIN		4,054.19M
MANDIRI INTIPERKASA		3,344.64M
MENARA CIPTA MULIA		617.62M
PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA		429.51M
PT ADARO INDONESIA		18,094.66M
PT ALAMJAYA BARA PRATAMA		4,515.68M
PT ANGSANA JAYA ENERGI		10,513.31M
PT ANTANG GUNUNG MERATUS		7,268.26M
PT ARUTMIN INDONESIA		28,125.54M

Sumber: Kuisisioner Laporan EITI

Dari hasil data CSR yang diperoleh dari perusahaan hanya tersedia data CSR yang bersifat agregat

Kesepakatan terkait Data Retribusi Daerah



Data Pajak Daerah yang diterima tiap Provinsi dan Kota

POSTUR APBD			
Nasional			
Tahun 2022			
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.			
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.137.851,30 M	1.121.818,82 M	98.59
PAD	330.901,06 M	313.272,81 M	94.67
Pajak Daerah	230.237,92 M	227.597,28 M	98.85
Retribusi Daerah	13.979,90 M	8.210,72 M	58.73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.858,68 M	10.821,49 M	91.25
Lain-Lain PAD yang Sah	74.824,56 M	66.643,32 M	89.07
TKDD *)	738.175,80 M	734.540,98 M	99.51
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	738.175,80 M	734.540,98 M	99.51
Pendapatan Lainnya	68.774,44 M	74.005,03 M	107.61
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.231,58 M	63.772,55 M	122.10
Pendapatan Hibah	8.868,65 M	5.392,69 M	60.81
Dana Darurat	0,00 M	1,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.674,21 M	4.838,80 M	63.05

Data pendapatan restribusi daerah nilainya sangat kecil dan tidak bisa dipisahkan khusus untuk Industri Ekstraktif

Sumber: [Portal Data APBD Dirjen Pajak Kemenkeu.](#)

Kesepakatan definisi terkait data Quasi Fiscal (Req 6.3)



Kegiatan kuasi fiskal adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari "tingkat pasar".

SK Kelembagaan Sekretariat Forum MSG (Usulan Keanggotaan)



EITI
INDONESIA



Laporan Hasil Pelaksanaan EITI Global Conference 2023



EITI
INDONESIA

- EITI Global Conference 2023 telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 12 sampai 15 Juni 2023 di CICAD, Diamniadio, Senegal
- Tema Utama **“Transparency in Transition”** --> paradigma global dalam menghadapi **transisi energi, penerapan GCG di Industri Ekstraktif** serta **mitigasi resiko korupsi** khususnya melalui transparansi di sektor industri ekstraktif
- Launching **Standar EITI 2023**, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang **dampak transisi energi, isu lingkungan dan emisi**, membantu mengatasi **risiko korupsi**, mempromosikan **kesetaraan gender**, dan meningkatkan **pengumpulan pendapatan** di 57 negara pelaksana
- Penetapan Board Member 2023-2026 --> **Bapak Agus Cahyono Adi** terpilih sebagai **alternate Board Member** EITI Implementing Countries untuk Kawasan Asia Pasifik

Rencana Kegiatan Mission EITI International (Pre-Validation dan Opening Extractive)



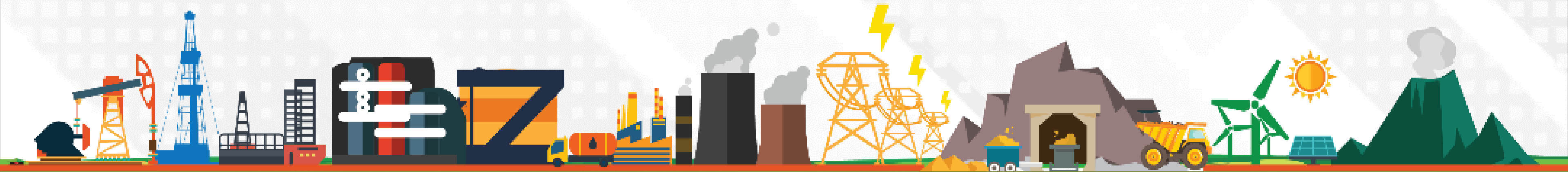
Date	Activity	Objective
4 September 2023	Kick-off meeting with Indonesia EITI (IEITI) Secretariat (Morning) High Level Luncheon Meeting on Beneficial Ownership Transparency (Afternoon)	To provide mission overview and final plans for the week To confirm and collaborate on ways forward on BO transparency in Indonesia (focus on extractives sector)
5- 6 September 2023	Workshop on BO Transparency with Opening Extractive	Transfer knowledge and sharing experience on BO Data Utilization focus on licensing process in extractive industries
7 September 2023	Workshop on Pre-validation EITI Template for MSG Members	To discuss remaining gaps on Requirements EITI and results of partial maistreaming
8 September 2023	Workshop on Pre-validation EITI Template for non MSG Members	To discuss remaining gaps on Requirements EITI and results of partial maistreaming
4-11 September 2023 (tentative based on the availability of the stakeholders)	Bilateral Meeting within specific stakeholders e.g. MOF, CSO, and World Bank	To discuss about many issues regarding EITI Implementation in Indonesia



EITI
INDONESIA

TERIMA KASIH

<https://eiti.esdm.go.id>



Target Rapat Forum MSG



1. Kesepakatan mekanisme pelaporan EITI paska tersedianya Portal Data Ekstraktif
 - Penyampaian Data yang sudah dimainstreaming dan masih manual
 - Mekanisme alur pelaporan EITI Existing dan yang baru
 - Kesepakatan *Cut-off* data untuk data yang ditampilkan di portal data ekstraktif secara audited (min year +6bulan)
 - Kesepakatan terkait persetujuan dari MSG untuk mempublikasi data dalam laporan portal setiap tahunnya
2. Kesepakatan kebutuhan data *disaggregate* untuk data yang dapat dipublish pada Portal.
 - Kesepakatan publikasi disaggregate data meliputi produksi, data pajak dan data PNBPN Migas dan Minerba
3. Kesepakatan Laporan Perusahaan melalui format webform kuesioner pada Portal Data Ekstraktif
 - Kesepakatan mekanisme pelaporan perusahaan melalui web Form kuisisioner seperti alur penyampaian data
 - Kesepakatan verifikasi data migas dan peran dari SKK Migas sebagai verifikator
 - Kesepakatan Tambahan data yang perlu diisi oleh perusahaan seperti data NTPN Pajak dan PNBPN didalam webform Kesepakatan
 - Kesepakatan permintaan Data Pajak menggunakan PPH 25 dan 29
 - Kesepakatan perbaikan Redaksional Lembar Otorisasi
4. Kesepakatan terkait tidak material Social Expenditure (Req 6.1)
5. Kesepakatan terkait tidak material Retribusi Daerah (Req 4.6)
6. Kesepakatan definisi terkait penilaian validasi pada data Quasi Fiscal (Req 6.2)